

Pendidikan Wirausaha bagi Masyarakat Sekitar Pembangunan Waduk Jatigede

by Arifin Arifin

Submission date: 17-Jul-2022 08:16AM (UTC-0400)

Submission ID: 1871509719

File name: Wirausaha_bagi_Masyarakat_Sekitar_Pembangunan_Waduk_Jatigede.pdf (494.95K)

Word count: 2852

Character count: 19743

PENDIDIKAN WIRUSAHA BAGI MASYARAKAT SEKITAR PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

Arifin

STIE Sebelas April Sumedang
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang 45323
Email: arifin6368@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Waduk Jatigede memiliki berbagai tujuan (*multipurpose*) yang ujungnya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan Waduk Jatigede antara lain adalah pengendalian air, pembangkit tenaga listrik dan pariwisata. Melalui pembangunan waduk Jatigede ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh berbagai keuntungan (*multibenefit*) antara lain tertanganinya masalah kekeringan dan banjir di wilayah pantura Jawa Barat, meningkatnya produksi padi sebagai stok pangan regional dan nasional, bertambahnya pembangkit tenaga listrik, penyediaan air baku, serta membuka peluang lapangan usaha dan lapangan kerja. Namun, dibalik manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari pembangunan Waduk Jatigede terdapat juga dampak negatifnya, diantaranya timbulnya dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan. Salah satu dampak sosial ekonomi yang timbul adalah adanya perubahan dan atau hilangnya mata pencaharian penduduk sebagai akibat dari berubahnya lingkungan fisik dan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi area genangan waduk. Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi tersebut adalah dengan merubah mindset masyarakat agraris menjadi masyarakat yang memiliki jiwa entrepreneur yang mampu mengembangkan kecakapan hidupnya melalui pendidikan dan pelatihan wirausaha.

Kata kunci: pendidikan wirausaha, masyarakat, waduk

PENDAHULUAN

Pembangunan bendungan tidak terlepas dari permasalahan fisik dan sosial. Esensinya bahwa pendekatan terhadap hakekat pembangunan bersifat perpaduan antara segi ekonomi dan segi sosial (Soemarwoto, 1983). Berbagai permasalahan ganti rugi lahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan waduk. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk semakin berani dalam mengekspresikan sikapnya terhadap lingkungan hidupnya, pembangunan daerah, dan terhadap kehidupan sosial budaya ekonominya. Akibatnya, betapa besar kerugian yang harus ditanggung karena proyek mengalami hambatan dan tertundanya waktu pelaksanaan, sedangkan pelaksanaan fisik dan teknis teknologis telah dilaksanakan. Timbulnya permasalahan sosial terjadi karena adanya gap atau kesenjangan antara harapan pemerintah dengan harapan berbagai pihak atau masyarakat. Berbagai bendungan yang telah diresmikan atau akan dibangun

ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini terjadi juga pada proyek pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang.

Pembangunan waduk Jatigede memiliki berbagai tujuan (*multipurpose*) yang ujungnya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan Waduk Jatigede antara lain untuk pengendalian air, pembangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Melalui pembangunan waduk Jatigede ini diharapkan masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan (*multibenefit*) antara lain tertanganinya masalah kekeringan dan banjir di wilayah pantura Jawa Barat, meningkatnya produksi padi sebagai stok pangan regional dan nasional, bertambahnya pembangkit tenaga listrik, penyediaan air baku, serta membuka peluang lapangan usaha dan lapangan kerja. Namun, dibalik manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari pembangunan Waduk Jatigede terdapat juga dampak negatifnya, diantaranya timbulnya dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan. Salah satu dampak sosial ekonomi yang timbul adalah adanya perubahan dan atau hilangnya mata pencaharian penduduk sebagai akibat dari berubahnya lingkungan fisik dan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi area genangan waduk.

Kewenangan Waduk Jatigede dalam pembangunan dan persiapan pengoperasiannya melibatkan tiga instansi besar, yaitu Departemen Pekerjaan Umum pusat, Satuan Kerja Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jatigede, dan Kabupaten Sumedang. Walaupun instansi tersebut telah bekerja, namun koordinasi dan '*networking*' yang terbentuk masih belum optimal dilaksanakan. Guna mengantisipasi dan mengatasi keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkena dampak, perlu dilakukan telaah seksama terhadap permasalahan eksisting sekaligus potensi masyarakat yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, kegiatan studi pendahuluan pembentukan model jejaring masyarakat Jatigede dirasa sangat mendesak untuk dilakukan. Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar pijakan untuk kajian lebih mendalam sehingga dapat dibentuk suatu *prototype* model solutif berupa jejaring masyarakat Jatigede yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan. Lebih lanjut diharapkan model jejaring ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan pendampingan masyarakat terkena dampak, sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan Waduk Jatigede dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terkait dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede dan terjadi kontra produktif, yaitu adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, seharusnya pembangunan waduk tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat namun sebaliknya justru menimbulkan masalah sosial baru dengan bertambahnya angka kemiskinan di masyarakat. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu mengkaji tentang pendidikan wirausaha apakah yang cocok dan bagaimana cara mengembangkan pendidikan wirausaha bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitian dan metode studi, kajian analisa dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan

menggunakan metode etno-survei, yaitu penggabungan antara pendekatan etnografi dan survei deskriptif (Creswell, John. W., V. L. Plano Clark. 2007). Penggambaran dilakukan dengan melakukan analisis terhadap parameter yang sedang diamati dengan menggunakan data rona lingkungan (*baseline*) dan prakiraan dampak. Analisis disajikan dalam bentuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilengkapi dengan tabel frekuensi, tabulasi silang, dan grafik. Hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang meliputi pelingkupan, pembuatan rona lingkungan, prakiraan dampak, evaluasi dampak, mitigasi dampak (pengelolaan), dan monitoring (pemantauan).

Metode Pengumpulan Data Rona Lingkungan Sosial

Pengumpulan data primer bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu teknik non survei dan survei atau menggunakan pendekatan triangulasi atau menggunakan lebih dari satu metode. Pengumpulan data primer untuk teknik non survei yang dapat digunakan dalam kajian ini melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengumpulan data dengan pengamatan langsung (*observasi*) terhadap aspek-aspek sosial di wilayah studi. Teknik survei dilaksanakan untuk kegunaan perhitungan statistik yang lebih spesifik. Salah satu teknik survei yang digunakan adalah pengambilan data melalui daftar pertanyaan (kuesioner), yang berisi pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat (opini), dan pertanyaan tentang sikap/persepsi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui instansi terkait dan studi kepustakaan tentang wilayah studi tentang kecamatan dalam angka mengenai jumlah penduduk, angkatan kerja produktif, tingkat pengangguran serta indikator sosial, ekonomi, dan budaya.

Metode Analisis Data

Kependudukan (Demografi)

a. Aspek social budaya

▪ Analisis kualitatif

Data sub komponen sosial budaya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif dan diinterpretasikan untuk pemahaman sosial budaya yang ada. Hasil interpretasi data kualitatif dipadukan dengan hasil analisis data kuantitatif. Mekanisme analisis data kualitatif dilakukan dengan cara setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukannya analisis data. Adapun metode analisis yang digunakan, yaitu identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi.

▪ Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode statistik sosial atau model fungsi matematik. Aspek sosial budaya yang diprakirakan diukur diantaranya sistem nilai budaya atau *cultural value system* masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. Variabel nilai budaya yang diukur diantaranya pola hubungan sosial masyarakat yang terdiri dari tingkat kerjasama (*cooperation*), tingkat persaingan (*competition*), dan tingkat pertentangan (*conflict*). Ketiga variable tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert.

b. Sosial ekonomi

Mengingat sebagian besar indikator-indikator ekonomi dapat dikuantifikasi, maka data-data ekonomi yang terkumpul sedapat mungkin diberi nilai moneter (*valuation*). Sehubungan dengan itu, ada tiga metode pemberian penilaian moneter, yaitu:

- 1) Penggunaan secara langsung berdasarkan harga pasar atau produktifitas (*market-based methods*)
- 2) Penggunaan pengganti harga pasar (*surrogate market value*)

- 3) Metode pasar buatan (*constructed market*) yang berdasar pada potensi pengeluaran atau kesediaan untuk membayar atau menerima (*potential expenditures, willingness to pay or willingness to accept*).

Metode Pemilihan Sampel dari Populasi

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (pemilihan sampel secara bertujuan). Metode tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menggali dan menggambarkan perubahan yang terjadi di masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan Waduk Jatigede. Pemilihan anggota sampel dilakukan terhadap penduduk yang diperkirakan terkena dampak langsung dari proyek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mobilisasi dan Permukiman Tenaga Kerja

Sosial Ekonomi

1. Kesempatan kerja dan usaha

Kegiatan penerimaan tenaga kerja diperkirakan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dengan terciptanya peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat. Jumlah tenaga kerja lokal yang dibutuhkan sekitar 722 orang atau 70.37% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi sebesar 1.026 orang. Sedangkan peluang usaha bagi masyarakat sekitar akan terbuka di sektor informal, seperti warung-warung kecil untuk mencukupi kebutuhan para karyawan kontraktor, seperti kebutuhan makan dan minum selama bekerja pada tahap konstruksi. Usaha lain yang bisa terbuka adalah usaha jasa pondokan bagi para karyawan dari luar yang tidak memiliki tempat tinggal.

2. Tingkat pendapatan penduduk

Adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja diperkirakan pendapatan rumah tangga penduduk akan bertambah. Peningkatan pendapatan akan berasal dari rekrutmen tenaga kerja, dimana tenaga kerja ini umumnya adalah tenaga kerja harian. Penambahan pendapatan akan diperoleh dari pendapatan harian besarnya sekitar Rp 20.000,- sampai Rp 30.000,- per hari. Besarnya peningkatan pendapatan yang akan diperoleh merupakan manfaat dari kegiatan konstruksi Waduk Jatigede yang dapat dihitung dengan menggunakan metode produktifitas yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dapat diserap serta upah minimum regional yang dapat diperoleh seorang tenaga kerja. Bila diasumsikan Upah Minimum Regional Kabupaten Sumedang adalah Rp 600.000,00 per bulan, maka seorang tenaga kerja (buruh bangunan) akan mendapatkan upah sebesar Rp 7.200.000,00 per tahun. Diasumsikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1.026 orang, maka total nilai manfaat dari kegiatan konstruksi Waduk Jatigede yang diterima oleh masyarakat adalah 7,2 milyar per tahun. Bila lamanya waktu untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi selama 7 tahun dan diasumsikan tingkat *discount rate* per tahun adalah 12%, maka nilai sekarang (*present value*) dari nilai manfaat yang diterima selama kegiatan konstruksi berlangsung adalah Rp 3.34 Milyar.

Sosial Budaya

1. Interaksi sosial/konflik

Kegiatan mobilisasi tenaga kerja diperkirakan dapat menimbulkan gangguan terhadap interaksi sosial di masyarakat berupa :

- Terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat.

Prakiraan timbulnya kecemburuan sosial apabila dalam rekrutmen tenaga kerja pihak proyek Waduk Jatigede lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar daerah dan tidak sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, khususnya untuk tenaga kerja *unskilled*.

- Terjadinya interaksi sosial antara pendatang dengan penduduk lokal.
Proses interaksi yang terjadi diperkirakan negatif karena tenaga kerja pendatang harus melakukan proses adaptasi dengan tenaga kerja lokal dan penduduk setempat. Pada tahap proses adaptasi ini diperkirakan terjadi perselisihan antara pendatang dengan tenaga kerja lokal dan penduduk setempat. Perselisihan dengan tenaga kerja lokal akan terjadi karena adanya konflik dalam bidang pekerjaan, dimana penduduk lokal diberi pekerjaan untuk kategori tenaga kerja kasar sedangkan tenaga kerja pendatang diberi pekerjaan untuk kategori tenaga kerja ahli (Zakaria, 2008).
2. Adat istiadat dan pola kebiasaan masyarakat
- a. Kegiatan mobilisasi dan pemukiman tenaga kerja diperkirakan berdampak pada adat istiadat/pola kebiasaan masyarakat setempat dengan jumlah tenaga kerja pendatang yang akan bermukim di wilayah genangan seperti Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Wado, dan Kecamatan Jatigede. Prakiraan dampak terhadap adat istiadat/pola kebiasaan masyarakat disebabkan oleh terjadinya proses sosialisasi budaya antara penduduk asli dan pendatang melalui proses interaksi yang merupakan hubungan timbal balik dan akan terjadi proses saling mempengaruhi (Zakaria, Mumuh Muhsin. 2008).
 - b. Selain itu kegiatan mobilisasi tenaga kerja konstruksi yang akan menyerap sekitar 1.026 orang tenaga kerja dimana sekitar 29.63% merupakan tenaga kerja pendatang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap pola kebiasaan yang berlaku di masyarakat baik positif maupun negatif. Dampak positif diperkirakan terjadi apabila keberadaan tenaga kerja dapat memberikan pengaruh positif bagi adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti terjadinya proses identifikasi masyarakat karena adanya pengaruh etos kerja yang tinggi dari tenaga kerja pendatang dan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena tenaga kerja pendatang umumnya memiliki keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi. Dampak negatif terjadi apabila tenaga kerja membawa pola kebiasaan yang bertentangan dengan norma agama atau sistem nilai yang berlaku di masyarakat seperti kebiasaan mabuk-mabukan atau memakai narkoba yang akan ditiru oleh anak-anak muda yang melakukan interaksi dengan tenaga kerja.
3. Pengembangan pendidikan kewirausahaan
- Pengembangan pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan dengan melihat peluang usaha pengolahan hasil perikanan tradisional melalui sejumlah aneka ragam teknik-teknik pengolahan yang bertujuan untuk mengawetkan ikan dengan cara pengurangan kadar air melalui pengeringan dan penambahan garam dan atau penambahan bahan kimia yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang menimbulkan cita rasa yang diinginkan. Data menunjukkan sekitar 50% hasil tangkapan ikan diolah secara tradisional. Adapun cara pengolahannya dilakukan secara umum diolah dengan drying, smoking, boiling, fermentation yang berskala industri rumah tangga. Ciri-ciri pengolahan hasil perikanan tradisional antara lain:
- a. Menggunakan bahan mentah (raw material) berupa komoditas biologis yang bersifat "perishable food" dan perlu penanganan khusus
 - b. Kegiatan pengolahan dilakukan secara sendiri-sendiri/kombinasi sifat ketradisional proses maupun sulit dikontrol lingkungan

- c. Faktor-faktor biologis dan kimia berbeda (kualitatif/kuantitatif) dalam proses dan mutu produk akhir (end product)
- d. Titik akhir dari suatu proses perlakuan tidak pasti dan sulit ditetapkan
- e. Proses-proses enzimatik, mikrobiologi, biokimia belum diungkap secara ilmiah baik dalam hubungannya dengan faktor mutu, sanitasi, dan higiene.

Adapun secara rinci pengolahan ikan tersebut diantaranya melalui :

1. Penggaraman

Penggaraman merupakan pengolahan dengan menggunakan garam konsentrasi tinggi. Pengawetan ikan dengan cara penggaraman terdiri dari dua proses, yaitu proses penggaraman dan proses pengeringan. Adapun tujuan utama dari penggaraman sama dengan tujuan pengawetan dan pengolahan lainnya, yaitu untuk memperpanjang daya tahan dan daya simpan ikan. Ikan yang mengalami proses penggaraman menjadi awet karena garam dapat menghambat atau membunuh bakteri penyebab kebusukan pada ikan. Penggaraman merupakan pengolahan dengan menggunakan garam konsentrasi tinggi.

2. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses pengambilan atau penurunan kadar air sampai batas tertentu hingga dapat memperlambat laju kerusakan "bahan pangan" akibat aktivitas biologik dan kimia sebelum bahan diolah (digunakan). Pemanasan ikan dalam lingkungan yang terkendali untuk membuang sebagian besar air yang terkandung pada ikan melalui peristiwa penguapan (atau dalam kasus pengeringan beku adalah sublimasi). Definisi ini tidak mencakup cara cara pengurangan kandungan air yang terkandung di dalam ikan tersebut melalui cara seperti pemisahan secara mekanis, penggunaan membran, penguapan, dan juga pemanggangan yang juga mengurangi kadar air bahan meskipun tidak sebanyak pengeringan.



Gambar 1. Produk ikan kering

3. Pengasapan

Pengasapan adalah salah satu teknik dehidrasi (pengeringan) yang dilakukan untuk mempergunakan bahan bakar kayu sebagai penghasil asap. Pengasapan akan

dihasilkan panas yang menyebabkan berkurangnya kadar air ikan dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas mikroorganisma (Winarno *et al.* 1980).



Gambar 2. Produk pengasapan ikan

4. Kerupuk Ikan

Kerupuk ikan didefinisikan sebagai hasil olahan dari campuran yang terdiri atas ikan segar, tepung tapioka dan bahan-bahan lain yang mengalami perlakuan pengadonan, pencetakan, pengukusan, penirisan, pengirisan, dan pengeringan. Jenis bahan baku yang umumnya digunakan sebagai bahan baku kerupuk ikan adalah ikan tenggiri, ikan gabus, ikan kakap, ikan gurami, ikan nila dan lain-lain.

5. Pemindangan

Pengolahan ikan dengan cara mengukus atau merebusnya dalam lingkungan bergaram dan bertekanan normal, dengan tujuan menghambat aktivitas atau membunuh bakteri pembusuk maupun aktivitas enzim. Teknik pengolahan sederhana sesuai dengan keadaan di Indonesia, sarana produksinya mudah diperoleh, biaya produksi yang relatif murah, dan rasa produk yang dihasilkan cocok dengan selera konsumen.

KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilaksanakan terhadap kegiatan pembangunan Waduk Jatigede menunjukkan kegiatan tersebut telah menimbulkan gangguan pada lingkungan sosial karena terjadinya perubahan pada struktur sosial dan terganggunya hubungan sosial antara pihak proyek, pemerintah daerah, dan penduduk yang disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan Waduk Jatigede yang tidak terintegrasi dengan kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakat. Sumber utama dampak terjadinya berbagai dampak negatif disebabkan oleh pembangunan Waduk Jatigede yang dicanangkan oleh pihak proyek tidak terintegrasi dengan kondisi lingkungan disekitarnya maupun dengan kebijakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial, menurut gerakan dalam AGIL Talcot Parsons ketidakseimbangan terjadi karena adanya ketegangan diantara status peran organisme perilaku dalam sistem sosial terhadap keadaan yang diinginkan dari

suatu sistem sosial. Organisme perilaku di sini adalah para pelaku pembangunan (*stakeholders*), yaitu pemerintah propinsi/kabupaten, pihak proyek, dan masyarakat.

Ketegangan terjadi karena setiap *stakeholders* memiliki tujuan masing-masing dalam menempatkan posisinya (*status-role*) di dalam kegiatan pembangunan Waduk Jatigede, yaitu :

1. Pihak proyek sebagai pelaksana kegiatan pembangunan Waduk Jatigede dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Waduk Jatigede masih berorientasi pada target penyelesaian fisik, namun kurang memperhatikan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan kebutuhan sosial (*social needs*) masyarakat khususnya para petani.
2. Pemerintah daerah dengan diberlakukannya UU No. 42 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menentukan kebijakan pembangunan Waduk Jatigede dengan tujuan untuk meningkatkan PDRB setempat yang diharapkan akan meningkatkan produksi pertanian, perikanan, dan PLTA bagi wilayah penerima manfaat. Namun dalam mekanisme pelaksanaannya pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan pembangunan Waduk Jatigede yang ramah lingkungan sehingga telah menimbulkan dampak sosial terhadap kehidupan para petani setempat.
3. Aspek kondisi masyarakat :
 - Masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan rencana pembangunan Waduk Jatigede oleh pemerintah daerah setempat dan pihak proyek baik mulai dari awal rencana sampai pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan.
 - Selain itu, pelibatan masyarakat terhadap penyusunan program pengelolaan lingkungan khususnya lingkungan sosial masih lemah. Melalui prinsip partisipasi seharusnya masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan monitoring program.
 - Dengan dilibatkannya masyarakat mulai dari proses perencanaan, maka masyarakat bisa memahami secara jelas hakekat dari tujuan dilaksanakannya rencana penambangan pembangunan Waduk Jatigede di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. W., V. L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California; London, U.K.; New Delhi, India.
- PPSDAL, LP, UNPAD. 2000, Studi Potensi Minat masyarakat dan Pilihan Lokasi kepindahan Penduduk Jatigede Secara Berkelompok, DPU Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dalam Makalah tentang Konflik Sosial (Kasus pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat) oleh : Opan S. Suwartapradja, 1985;
- PPSDAL, LP, UNPAD. 2005, Reidentifikasi Penduduk Jatigede, Kerjasama DPU Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dalam Makalah tentang Konflik Sosial (Kasus Pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat) oleh : Opan S. Suwartapradja, 1985;
- PPSDAL, LPPM, UNPAD. 2013. Laporan Akhir: Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Kawasan Waduk dan Pembentukan Masyarakat Peduli Waduk Cirata
- Soemarwoto, Otto. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Jembatan*, Jakarta dalam Makalah tentang Konflik Sosial (Kasus pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat) oleh : Opan S. Suwartapradja, 1985.

Zakaria, Mumuh Muhsin. 2008. Jatigede dalam Tinjauan Sejarah dan Budaya. Makalah disampaikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 22 September 2008. Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Bandung.

Pendidikan Wirausaha bagi Masyarakat Sekitar Pembangunan Waduk Jatigede

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ ml.scribd.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%